



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/KM.7/2022

TENTANG

PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PERIODE KETIGA
PADA TAHUN 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 kepada daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua Pada Tahun 2022;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan pagu Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang tersedia setelah dilakukan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyaluran kembali;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif serta untuk mengurangi uang kas simpanan pemerintah daerah di perbankan dalam jumlah tidak wajar, penyaluran sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2022 perlu dilakukan dalam bentuk nontunai berupa *treasury deposit facility*;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Transfer ke Daerah dalam bentuk *treasury deposit facility* ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2022 yakni Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 untuk periode ketiga pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp15.002.739.118.851,00 (lima belas triliun dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebesar Rp1.568.264.588.386,00 (satu triliun lima ratus enam puluh delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 1. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.423.092.133.024,00 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah); dan
 2. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp145.172.455.362,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp203.197.896.593,00 (dua ratus tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 1. bagi rata sebesar Rp6.436.808.551,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
 2. bagian daerah sebesar Rp180.327.570.940,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
 3. biaya pemungutan sebesar Rp16.433.517.102,00 (enam belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu seratus dua rupiah);
 - c. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp9.707.488.006,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam rupiah);
 - d. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp4.092.453.454.368,00 (empat triliun sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 1. minyak bumi sebesar Rp1.575.917.049.581,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah); dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. gas bumi sebesar Rp2.516.536.404.787,00 (dua triliun lima ratus enam belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- e. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp9.089.925.214.530,00 (sembilan triliun delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 1. iuran tetap (*landrent*) sebesar Rp61.202.661.435,00 (enam puluh satu miliar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah); dan
 2. royalti sebesar Rp9.028.722.553.095,00 (sembilan triliun dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah);
- f. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp14.223.841.594,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas:
 1. iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebesar Rp11.357.247.970,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 2. provisi sumber daya hutan sebesar Rp2.744.249.676,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 3. dana reboisasi sebesar Rp122.343.948,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah); dan
- g. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp24.966.635.374,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 1. iuran tetap sebesar Rp16.264.672,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 2. iuran produksi sebesar Rp26.074.608,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 3. setoran bagian pemerintah sebesar Rp24.924.296.094,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KETIGA : Sisa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 setelah diperhitungkan dengan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 untuk periode ketiga pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebesar Rp3.968.894.493.111,00 (tiga triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah).
- KEEMPAT : Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilaksanakan melalui:
- penyaluran secara tunai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp9.465.879.725.496,00 (sembilan triliun empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - penyaluran secara nontunai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening *Treasury Deposit Facility* Daerah sebesar Rp5.536.859.393.355,00 (lima triliun lima ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- KELIMA : Ketentuan mengenai:
- tata cara perhitungan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil untuk periode ketiga pada tahun 2022;
 - metode penentuan bentuk penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil secara tunai atau nontunai;
 - rincian penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil secara tunai atau nontunai menurut daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - rincian penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 untuk periode ketiga pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan sisa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menurut daerah provinsi/kabupaten/kota;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Rincian penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA digunakan oleh:
- Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk menyalurkan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dalam penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2022; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Pemerintah Daerah untuk mencatat penerimaan Dana Bagi Hasil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH

- : Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dicatat pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan kode Satuan Kerja 999204 (Satuan Kerja Transfer Dana Perimbangan/Dana Bagi Hasil) dengan menggunakan akun:
 - a. Belanja Dana Bagi Hasil (Kode Akun 611111 s.d. 613111) sebagai realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Penerimaan non Anggaran Pihak Ketiga Pokok Dana Bagi Hasil yang disimpan pada Rekening *Treasury Deposit Facility* - Transfer ke Daerah (Kode Akun 817251) sebagai Penerimaan Non Anggaran pemindahbukuan pokok Dana Bagi Hasil yang disimpan pada Rekening *Treasury Deposit Facility* - Transfer ke Daerah;
 - c. Pengeluaran non Anggaran Pihak Ketiga Pokok Dana Bagi Hasil yang disimpan pada Rekening *Treasury Deposit Facility* - Transfer ke Daerah (Kode Akun 827251) sebagai Pengeluaran Non Anggaran pemindahbukuan pokok Dana Bagi Hasil yang disimpan pada Rekening *Treasury Deposit Facility* - Transfer ke Daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Gubernur bersangkutan;
4. Bupati/Wali Kota bersangkutan; dan
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

LUKY ALFIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga,





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

D. RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022 DAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPH PASAL 21	PPH PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Kota Medan	6.680.227.585	12.023.393.375	18.703.620.960
2	Kota Padang	1.778.070.869	5.542.334.755	7.320.405.624
3	Provinsi DKI Jakarta	1.202.095.192.262	-	1.202.095.192.262
4	Provinsi Jawa Barat	-	14.762.377.705	14.762.377.705
5	Kab. Bekasi	9.502.678.182	-	9.502.678.182
6	Kota Bandung	13.912.598.105	16.461.909.254	30.374.507.359
7	Provinsi Jawa Tengah	678.402.909	18.959.557.227	19.637.960.136
8	Provinsi DI Yogyakarta	3.713.282.286	3.128.295.130	6.841.577.416
9	Kab. Sleman	2.288.833.752	723.073.213	3.011.906.965
10	Kota Surabaya	11.821.946.628	49.564.930.143	61.386.876.771
11	Kota Pontianak	-	1.088.501.685	1.088.501.685
12	Kota Makassar	8.790.405.123	5.985.685.124	14.776.090.247



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPH PASAL 21	PPH PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
13	Kota Denpasar	1.052.626.573	2.684.968.392	3.737.594.965
14	Provinsi Banten	70.252.444.270	7.365.589.866	77.618.034.136
15	Kab. Lebak	2.968.900.397	1.108.555.367	4.077.455.764
16	Kab. Serang	11.727.678.915	1.102.617.706	12.830.296.621
17	Kab. Tangerang	35.210.527.443	-	35.210.527.443
18	Kota Tangerang	19.527.027.724	-	19.527.027.724
19	Kota Tangerang Selatan	21.091.290.001	4.670.666.420	25.761.956.421
	JUMLAH	1.423.092.133.024	145.172.455.362	1.568.264.588.386

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Pidie	-	-	-	-
2	Kab. Aceh Barat Daya	-	-	-	-
3	Kab. Nagan Raya	-	314.675.160	-	-
4	Kab. Labuhanbatu	-	7.926.904.305	-	-
5	Kab. Padang Lawas Utara	-	5.534.724.157	-	-
6	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	11.825.765.027	-	-
7	Kab. Limapuluh Kota	255.985.083	131.355.549	-	-
8	Kab. Kepulauan Mentawai	367.638.515	-	234.977.725	-
9	Kab. Sijunjung	-	228.987.265	-	-
10	Kab. Solok	75.614.333	71.954.867	-	-
11	Kota Padang	803.667.166	-	-	-

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
1	Kab. Pidie	-	24.948.518	60.807.157	85.755.675
2	Kab. Aceh Barat Daya	-	-	34.198.662	34.198.662
3	Kab. Nagan Raya	-	-	60.807.157	375.482.317
4	Kab. Labuhanbatu	-	-	-	7.926.904.305
5	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	60.807.157	5.595.531.314
6	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	60.807.157	11.886.572.184
7	Kab. Limapuluh Kota	-	304.242.685	60.807.157	496.405.391
8	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	60.807.157	295.784.882
9	Kab. Sijunjung	-	-	60.807.157	289.794.422
10	Kab. Solok	-	47.855	60.807.157	132.809.879
11	Kota Padang	-	3.169.567.467	-	3.169.567.467

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI				
1	2	11	12	13	14
1	Kab. Pidie	-	-	-	-
2	Kab. Aceh Barat Daya	7.139.146	-	-	-
3	Kab. Nagan Raya	124.940.377	-	-	-
4	Kab. Labuhanbatu	-	-	-	-
5	Kab. Padang Lawas Utara	422.602.035	1.220.766	-	5.820.461
6	Kab. Labuhanbatu Selatan	31.306.892	47.686.923	-	-
7	Kab. Limapuluh Kota	5.473.273	-	-	-
8	Kab. Kepulauan Mentawai	-	6.527.298	-	-
9	Kab. Sijunjung	20.242.502	-	-	-
10	Kab. Solok	2.998.203	-	-	-
11	Kota Padang	-	-	-	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR		JUMLAH	
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA		
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
1	Kab. Pidie	11.112.891	1.900.255	13.013.146	98.768.821
2	Kab. Aceh Barat Daya	727.083	1.900.255	9.766.484	43.965.146
3	Kab. Nagan Raya	1.018.838	1.900.255	127.859.470	503.341.787
4	Kab. Labuhanbatu	-	-	-	7.926.904.305
5	Kab. Padang Lawas Utara	-	2.406.523	432.049.785	6.027.581.099
6	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	78.993.815	11.965.565.999
7	Kab. Limapuluh Kota	8.450.825	1.688.560	15.612.658	768.003.132
8	Kab. Kepulauan Mentawai	-	1.688.560	8.215.858	671.639.255
9	Kab. Sijunjung	-	1.688.560	21.931.062	311.725.484
10	Kab. Solok	1.329	1.688.560	4.688.092	213.112.304
11	Kota Padang	-	-	-	3.973.234.633

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
12	Kota Sawahlunto	-	-	-	-
13	Kab. Bengkalis	-	5.758.609.106	1.692.889.290	14.282.527.003
14	Kab. Rokan Hilir	-	9.860.720.730	356.599.095	5.133.758.455
15	Kab. Rokan Hulu	-	2.686.796.471	-	-
16	Kota Pekanbaru	-	367.268.648	-	-
17	Kab. Batang Hari	-	-	-	-
18	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	709.533.618	53.186.378	38.715.911.535
19	Provinsi Bengkulu	-	2.448.024.930	-	-
20	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	-
21	Kab. Rejang Lebong	21.502.172	7.511.481	-	-
22	Kab. Kaur	-	669.777.816	-	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
12	Kota Sawahlunto	-	2.094.979.043	60.807.157	2.155.786.200
13	Kab. Bengkalis	-	10.909.728	60.807.157	21.805.742.284
14	Kab. Rokan Hilir	-	-	60.807.157	15.411.885.437
15	Kab. Rokan Hulu	-	-	60.807.157	2.747.603.628
16	Kota Pekanbaru	-	-	60.807.157	428.075.805
17	Kab. Batang Hari	-	-	-	-
18	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	144.563.478	60.807.157	39.684.002.166
19	Provinsi Bengkulu	-	-	152.016.393	2.600.041.323
20	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	-
21	Kab. Rejang Lebong	109.098.089	3.624.927	60.807.157	181.041.654
22	Kab. Kaur	-	-	60.807.157	730.584.973

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI				
1	2	11	12	13	14
12	Kota Sawahlunto	-	-	-	-
13	Kab. Bengkulu	255.937.960	65.834.372	1.054.518.243	-
14	Kab. Rokan Hilir	438.253.855	13.867.781	1.485.378.512	-
15	Kab. Rokan Hulu	794.615.497	3.688.644	2.647.986	-
16	Kota Pekanbaru	24.733.230	896.314	-	-
17	Kab. Batang Hari	173.779.788	-	-	-
18	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	31.535.072	2.031.167	3.143.255.012	-
19	Provinsi Bengkulu	131.474.729	-	-	11.160.966
20	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	-
21	Kab. Rejang Lebong	333.377	-	-	3.636.570
22	Kab. Kaur	36.485.571	-	-	3.540.280

9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR		JUMLAH	
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA		
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
12	Kota Sawahlunto	67.773.717	1.688.560	69.462.277	2.225.248.477
13	Kab. Bengkulu	363.658	2.026.072	1.378.680.305	23.184.422.589
14	Kab. Rokan Hilir	-	2.026.072	1.939.526.220	17.351.411.657
15	Kab. Rokan Hulu	-	2.026.072	802.978.199	3.550.581.827
16	Kota Pekanbaru	-	2.026.072	27.655.616	455.731.421
17	Kab. Batang Hari	-	1.773.438	175.553.226	175.553.226
18	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5.019.912	2.111.950	3.183.953.113	42.867.955.279
19	Provinsi Bengkulu	45.794.813	5.066.680	193.497.188	2.793.538.511
20	Kab. Bengkulu Selatan	-	1.911.690	1.911.690	1.911.690
21	Kab. Rejang Lebong	120.598	2.026.072	6.116.617	208.660.443
22	Kab. Kaur	320.419	2.026.072	42.372.342	772.957.315

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
23	Kab. Seluma	-	1.166.950.335	-	-
24	Kab. Lebong	-	26.651.035	-	-
25	Provinsi Jawa Barat	-	4.028.452.943	3.154.519.672	-
26	Kab. Bekasi	803.667.166	-	-	-
27	Kota Bandung	803.667.166	-	-	-
28	Provinsi Jawa Tengah	-	192.521.405	5.953.953.221	-
29	Kab. Blora	-	-	3.732.714.002	-
30	Kab. Sleman	469.841.120	-	-	-
31	Kota Surabaya	803.667.166	-	-	-
32	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-
33	Kab. Bengkayang	-	2.169.378.495	-	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
23	Kab. Seluma	-	-	60.807.157	1.227.757.492
24	Kab. Lebong	535.255.584	-	60.807.157	622.713.776
25	Provinsi Jawa Barat	15.464.538.939	5.545.930.816	410.445.060	28.603.887.430
26	Kab. Bekasi	-	302.766.377	59.469.157	362.235.534
27	Kota Bandung	-	-	60.807.157	60.807.157
28	Provinsi Jawa Tengah	940.254.532	1.026.553.468	399.280.374	8.512.563.000
29	Kab. Blora	-	-	60.807.157	3.793.521.159
30	Kab. Sleman	-	-	-	-
31	Kota Surabaya	-	-	55.596.157	55.596.157
32	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-
33	Kab. Bengkayang	-	-	40.305.157	2.209.683.652

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI				
1	2	11	12	13	14
23	Kab. Seluma	106.085.466	-	-	-
24	Kab. Lebong	1.184.402	-	-	33.620.474
25	Provinsi Jawa Barat	44.760.466	30.669.082	-	128.871.216
26	Kab. Bekasi	-	-	-	-
27	Kota Bandung	-	-	-	-
28	Provinsi Jawa Tengah	7.134.179	231.542.270	-	31.341.351
29	Kab. Blora	-	394.965.029	-	-
30	Kab. Sleman	-	-	-	-
31	Kota Surabaya	-	-	-	-
32	Provinsi Kalimantan Barat	629.502.741	29.829.919	-	-
33	Kab. Bengkayang	286.412.289	-	-	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR		JUMLAH	
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA		
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
23	Kab. Seluma	2.943.202	2.026.072	111.054.740	1.338.812.232
24	Kab. Lebong	491.618	2.026.072	37.322.566	660.036.342
25	Provinsi Jawa Barat	46.215.932	3.420.059	253.936.755	28.857.824.185
26	Kab. Bekasi	11.984.279	2.353.523	14.337.802	1.180.240.502
27	Kota Bandung	-	2.406.523	2.406.523	866.880.846
28	Provinsi Jawa Tengah	34.218.482	13.309.379	317.545.661	8.830.108.661
29	Kab. Blora	-	2.026.072	396.991.101	4.190.512.260
30	Kab. Sleman	-	-	-	469.841.120
31	Kota Surabaya	-	1.929.950	1.929.950	861.193.273
32	Provinsi Kalimantan Barat	-	3.918.460	663.251.120	663.251.120
33	Kab. Bengkayang	1.285.269	1.399.950	289.097.508	2.498.781.160



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
34	Kab. Ketapang	-	1.461.505.533	-	-
35	Kab. Sintang	-	4.388.231.538	-	-
36	Kota Pontianak	803.667.166	-	-	-
37	Kab. Sekadau	-	-	-	-
38	Kab. Kubu Raya	-	2.057.235.790	-	-
39	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-
40	Kab. Kepulauan Tanimbar	179.954.177	-	190.323.131	-
41	Kab. Maluku Tengah	-	2.368.760.614	-	-
42	Kab. Seram Bagian Timur	244.270.155	-	-	-
43	Kab. Kepulauan Aru	-	-	1.431.475.802	-
44	Kab. Halmahera Tengah	-	-	676.056.577	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
34	Kab. Ketapang	-	-	60.807.157	1.522.312.690
35	Kab. Sintang	-	-	60.807.157	4.449.038.695
36	Kota Pontianak	-	-	40.305.157	40.305.157
37	Kab. Sekadau	-	-	22.099.761	22.099.761
38	Kab. Kubu Raya	-	-	60.807.157	2.118.042.947
39	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-
40	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	-	60.807.157	251.130.288
41	Kab. Maluku Tengah	-	-	60.807.157	2.429.567.771
42	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	60.807.157	60.807.157
43	Kab. Kepulauan Aru	-	-	40.305.157	1.471.780.959
44	Kab. Halmahera Tengah	-	3.416.316.159	60.536.157	4.152.908.893

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI				
1	2	11	12	13	14
34	Kab. Ketapang	1.315.989.702	343.992.648	-	-
35	Kab. Sintang	534.850.412	43.966.386	-	-
36	Kota Pontianak	-	-	-	-
37	Kab. Sekadau	228.023.675	3.145.681	-	-
38	Kab. Kubu Raya	384.178.899	80.599.776	-	-
39	Kab. Kotawaringin Timur	109.518.939	-	-	-
40	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	6.608.074	-	-
41	Kab. Maluku Tengah	117.134.945	10.635.770	-	2.801.583
42	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	-
43	Kab. Kepulauan Aru	-	52.866.011	-	-
44	Kab. Halmahera Tengah	-	29.577.475	-	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR		JUMLAH	
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA		
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
34	Kab. Ketapang	1.161.925.972	2.111.950	2.824.020.272	4.346.332.962
35	Kab. Sintang	-	2.111.950	580.928.748	5.029.967.443
36	Kota Pontianak	-	1.399.950	1.399.950	845.372.273
37	Kab. Sekadau	-	2.111.950	233.281.306	255.381.067
38	Kab. Kubu Raya	1.924.182	2.111.950	468.814.807	2.586.857.754
39	Kab. Kotawaringin Timur	-	1.773.438	111.292.377	111.292.377
40	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	1.900.255	8.508.329	439.592.794
41	Kab. Maluku Tengah	374	1.900.255	132.472.927	2.562.040.698
42	Kab. Seram Bagian Timur	-	1.900.255	1.900.255	306.977.567
43	Kab. Kepulauan Aru	-	1.259.255	54.125.266	1.525.906.225
44	Kab. Halmahera Tengah	1.363.214.795	2.269.706	1.395.061.976	5.547.970.869

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
45	Kab. Lebak	803.667.166	770.974.406	882.404.479	-
JUMLAH		6.436.808.551	67.173.271.224	18.359.099.372	58.132.196.993

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA				
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
45	Kab. Lebak	119.555	673.742.857	-	2.327.241.297
JUMLAH		17.049.266.699	16.718.193.378	2.895.543.274	180.327.570.940

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI				
1	2	11	12	13	14
45	Kab. Lebak	-	-	-	-
JUMLAH		6.266.627.622	1.400.151.386	5.685.799.753	220.792.901

7.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR		JUMLAH	
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA		
1	2	15	16	17=11+12+13+14+1 5+16	18
45	Kab. Lebak	-	-	-	3.130.908.463
JUMLAH		2.764.908.188	95.237.252	16.433.517.102	203.197.896.593

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	CHT
1	2	3
1	Provinsi Jawa Tengah	9.496.375.270
2	Kab. Lamongan	211.112.736
JUMLAH		9.707.488.006

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Provinsi Aceh	-	-	64.875.505.428	64.875.505.428
2	Kab. Aceh Timur	3.294.500.372	-	-	3.294.500.372
3	Kab. Pidie	563.672.542	-	-	563.672.542
4	Kab. Aceh Barat Daya	563.672.542	-	-	563.672.542
5	Kab. Aceh Jaya	391.482.249	-	-	391.482.249
6	Kab. Nagan Raya	563.672.542	-	-	563.672.542
7	Kab. Padang Lawas Utara	22.972.387	766.113	-	23.738.500
8	Kab. Bengkalis	-	-	-	-
9	Kab. Indragiri Hilir	8.233.879.319	347.049.210	-	8.580.928.529
10	Kab. Kampar	31.533.932.341	1.255.867.098	-	32.789.799.439
11	Kab. Kuantan Singingi	7.199.012.565	347.049.210	-	7.546.061.775

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
1	Provinsi Aceh	3.987.520.646	-	21.156.947.167	25.144.467.813	90.019.973.241
2	Kab. Aceh Timur	900.279.392	-	-	900.279.392	4.194.779.764
3	Kab. Pidie	362.501.877	-	-	362.501.877	926.174.419
4	Kab. Aceh Barat Daya	362.501.877	-	-	362.501.877	926.174.419
5	Kab. Aceh Jaya	362.501.877	-	-	362.501.877	753.984.126
6	Kab. Nagan Raya	362.501.877	-	-	362.501.877	926.174.419
7	Kab. Padang Lawas Utara	21.537.024	359.284	-	21.896.308	45.634.808
8	Kab. Bengkalis	5.050.665.087	84.177.718	-	5.134.842.805	5.134.842.805
9	Kab. Indragiri Hilir	5.050.665.087	84.177.718	-	5.134.842.805	13.715.771.334
10	Kab. Kampar	9.762.550.929	-	-	9.762.550.929	42.552.350.368
11	Kab. Kuantan Singingi	5.050.665.087	84.177.718	-	5.134.842.805	12.680.904.580

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
12	Kab. Pelalawan	3.460.485.353	382.212.700	-	3.842.698.053
13	Kab. Rokan Hilir	46.282.025.196	-	-	46.282.025.196
14	Kab. Rokan Hulu	9.114.293.658	303.809.955	-	9.418.103.613
15	Kab. Siak	41.218.660.506	1.672.989.652	-	42.891.650.158
16	Kota Dumai	5.529.726.188	347.049.210	-	5.876.775.398
17	Kota Pekanbaru	10.411.479.311	347.049.210	-	10.758.528.521
18	Kab. Kepulauan Meranti	11.639.225.763	627.142.372	-	12.266.368.135
19	Kab. Batang Hari	7.863.297.591	262.110.253	-	8.125.407.844
20	Kab. Muaro Jambi	3.248.723.401	375.600.759	-	3.624.324.160
21	Kab. Sarolangun	2.359.815.521	333.010.652	-	2.692.826.173
22	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
12	Kab. Pelalawan	42.131.039.712	-	-	42.131.039.712	45.973.737.765
13	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	-	46.282.025.196
14	Kab. Rokan Hulu	5.050.665.087	84.177.718	-	5.134.842.805	14.552.946.418
15	Kab. Siak	1.665.014.942	-	-	1.665.014.942	44.556.665.100
16	Kota Dumai	5.050.665.087	84.177.718	-	5.134.842.805	11.011.618.203
17	Kota Pekanbaru	4.958.473.029	-	-	4.958.473.029	15.717.001.550
18	Kab. Kepulauan Meranti	3.170.765.793	-	-	3.170.765.793	15.437.133.928
19	Kab. Batang Hari	2.119.072.774	35.317.212	-	2.154.389.986	10.279.797.830
20	Kab. Muaro Jambi	17.692.521.957	-	-	17.692.521.957	21.316.846.117
21	Kab. Sarolangun	19.399.943.779	323.331.913	-	19.723.275.692	22.416.101.865
22	Kab. Tanjung Jabung Barat	169.767.207.009	-	-	169.767.207.009	169.767.207.009

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
23	Kab. Tebo	-	-	-	-
24	Kab. Musi Banyuasin	-	-	-	-
25	Kab. Musi Rawas	-	-	-	-
26	Kota Palembang	-	-	-	-
27	Kota Prabumulih	-	-	-	-
28	Kota Pagar Alam	-	-	-	-
29	Kab. Banyuasin	-	-	-	-
30	Kab. Empat Lawang	-	-	-	-
31	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	13.510.494.250	450.349.409	-	13.960.843.659
32	Kab. Musi Rawas Utara	-	-	-	-
33	Kab. Lampung Timur	15.111.434.063	-	-	15.111.434.063

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
23	Kab. Tebo	18.631.931.417	323.264.983	-	18.955.196.400	18.955.196.400
24	Kab. Musi Banyuasin	303.706.722.199	-	-	303.706.722.199	303.706.722.199
25	Kab. Musi Rawas	51.738.594.113	907.489.388	-	52.646.083.501	52.646.083.501
26	Kota Palembang	17.969.158.636	421.135.622	-	18.390.294.258	18.390.294.258
27	Kota Prabumulih	15.474.854.941	483.870.332	-	15.958.725.273	15.958.725.273
28	Kota Pagar Alam	13.605.501.035	421.135.622	-	14.026.636.657	14.026.636.657
29	Kab. Banyuasin	17.882.253.502	421.135.622	-	18.303.389.124	18.303.389.124
30	Kab. Empat Lawang	16.530.219.466	421.135.622	-	16.951.355.088	16.951.355.088
31	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	20.556.254.542	-	-	20.556.254.542	34.517.098.201
32	Kab. Musi Rawas Utara	13.760.569.780	421.135.622	-	14.181.705.402	14.181.705.402
33	Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	15.111.434.063

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
34	Provinsi Jawa Barat	26.431.350.026	891.449.546	-	27.322.799.572
35	Kab. Bekasi	3.375.415.918	112.128.553	-	3.487.544.471
36	Kab. Subang	1.472.100.844	190.846.416	-	1.662.947.260
37	Kota Bandung	1.480.516.997	-	-	1.480.516.997
38	Provinsi Jawa Tengah	817.947.331	27.265.111	-	845.212.442
39	Kab. Blora	1.624.346.485	54.145.283	-	1.678.491.768
40	Provinsi Jawa Timur	443.780.852.403	14.601.817.590	-	458.382.669.993
41	Kab. Bojonegoro	648.799.144.936	-	-	648.799.144.936
42	Kab. Jombang	16.380.480.343	-	-	16.380.480.343
43	Kab. Lamongan	17.019.572.098	890.727.700	-	17.910.299.798
44	Kab. Madiun	19.038.647.681	890.727.700	-	19.929.375.381

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
34	Provinsi Jawa Barat	46.026.746.227	772.867.916	-	46.799.614.143	74.122.413.715
35	Kab. Bekasi	11.132.989.326	-	-	11.132.989.326	14.620.533.797
36	Kab. Subang	24.373.725.708	-	-	24.373.725.708	26.036.672.968
37	Kota Bandung	-	-	-	-	1.480.516.997
38	Provinsi Jawa Tengah	3.196.983.590	53.282.910	-	3.250.266.500	4.095.478.942
39	Kab. Blora	6.367.933.139	-	-	6.367.933.139	8.046.424.907
40	Provinsi Jawa Timur	-	-	-	-	458.382.669.993
41	Kab. Bojonegoro	-	-	-	-	648.799.144.936
42	Kab. Jombang	-	-	-	-	16.380.480.343
43	Kab. Lamongan	1.281.157.924	21.050.042	-	1.302.207.966	19.212.507.764
44	Kab. Madiun	288.878.435	-	-	288.878.435	20.218.253.816

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
45	Kab. Nganjuk	17.945.101.694	890.727.700	-	18.835.829.394
46	Kab. Ngawi	16.578.547.886	890.727.700	-	17.469.275.586
47	Kab. Tuban	27.322.948.913	-	-	27.322.948.913
48	Kota Surabaya	9.619.018.358	-	-	9.619.018.358
49	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-	-
50	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	-	-
51	Kab. Banggai	9.802.079.954	944.395.524	-	10.746.475.478
52	Kab. Donggala	-	-	-	-
53	Kab. Poso	-	-	-	-
54	Kota Palu	-	-	-	-
55	Kab. Parigi Moutong	-	-	-	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
45	Kab. Nganjuk	249.397.789	-	-	249.397.789	19.085.227.183
46	Kab. Ngawi	332.298.412	-	-	332.298.412	17.801.573.998
47	Kab. Tuban	-	-	-	-	27.322.948.913
48	Kota Surabaya	-	-	-	-	9.619.018.358
49	Kab. Kutai Kartanegara	-	90.616.066	-	90.616.066	90.616.066
50	Provinsi Sulawesi Tengah	8.682.403.727	1.176.960.025	-	9.859.363.752	9.859.363.752
51	Kab. Banggai	141.235.244.030	2.353.921.050	-	143.589.165.080	154.335.640.558
52	Kab. Donggala	119.857.909	196.160.171	-	316.018.080	316.018.080
53	Kab. Poso	2.057.868	196.160.171	-	198.218.039	198.218.039
54	Kota Palu	4.321.975.460	196.160.171	-	4.518.135.631	4.518.135.631
55	Kab. Parigi Moutong	104.764.000	196.160.171	-	300.924.171	300.924.171

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
56	Kab. Tojo Una Una	-	-	-	-
57	Kab. Banggai Laut	-	-	-	-
58	Kab. Natuna	-	-	-	-
59	Kab. Kepulauan Anambas	-	-	-	-
60	Kota Batam	-	-	-	-
61	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-
62	Kab. Fak Fak	-	-	-	-
63	Kab. Sorong	-	-	-	-
64	Kota Sorong	-	-	-	-
65	Kab. Raja Ampat	-	-	-	-
66	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
56	Kab. Tojo Una Una	-	14.760.873	-	14.760.873	14.760.873
57	Kab. Banggai Laut	1.093.587.622	196.160.171	-	1.289.747.793	1.289.747.793
58	Kab. Natuna	98.215.140.798	-	-	98.215.140.798	98.215.140.798
59	Kab. Kepulauan Anambas	71.873.966.179	-	-	71.873.966.179	71.873.966.179
60	Kota Batam	43.771.767.745	-	-	43.771.767.745	43.771.767.745
61	Provinsi Papua Barat	-	-	793.367.690.859	793.367.690.859	793.367.690.859
62	Kab. Fak Fak	14.797.393.136	-	-	14.797.393.136	14.797.393.136
63	Kab. Sorong	21.325.460.465	-	-	21.325.460.465	21.325.460.465
64	Kota Sorong	18.185.369.246	-	-	18.185.369.246	18.185.369.246
65	Kab. Raja Ampat	612.325.498	-	-	612.325.498	612.325.498
66	Kab. Sorong Selatan	18.241.880.978	-	-	18.241.880.978	18.241.880.978

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
67	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-
68	Kab. Teluk Wondama	-	-	-	-
69	Kab. Kaimana	-	-	-	-
70	Kab. Maybrat	-	-	-	-
71	Kab. Tambrauw	-	-	-	-
72	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-
73	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	-
JUMLAH		1.483.604.529.527	27.437.014.626	64.875.505.428	1.575.917.049.581

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
67	Kab. Teluk Bintuni	257.380.075.455	-	-	257.380.075.455	257.380.075.455
68	Kab. Teluk Wondama	18.789.881.454	-	-	18.789.881.454	18.789.881.454
69	Kab. Kaimana	20.789.685.852	-	-	20.789.685.852	20.789.685.852
70	Kab. Maybrat	17.990.294.659	-	-	17.990.294.659	17.990.294.659
71	Kab. Tambrauw	15.595.642.446	-	-	15.595.642.446	15.595.642.446
72	Kab. Manokwari Selatan	16.693.131.412	-	-	16.693.131.412	16.693.131.412
73	Kab. Pegunungan Arfak	16.739.971.163	-	-	16.739.971.163	16.739.971.163
JUMLAH		1.691.947.307.212	10.064.459.549	814.524.638.026	2.516.536.404.787	4.092.453.454.368



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Kab. Aceh Barat	-	13.177.307.722	13.177.307.722
2	Kab. Aceh Tengah	1.725.497.393	776.624.935	2.502.122.328
3	Kab. Aceh Timur	-	296.401.361	296.401.361
4	Kab. Pidie	-	994.341.503	994.341.503
5	Kab. Aceh Barat Daya	-	923.857.243	923.857.243
6	Kab. Aceh Jaya	-	1.018.517.579	1.018.517.579
7	Kab. Nagan Raya	-	3.926.623.388	3.926.623.388
8	Kab. Padang Lawas Utara	-	824.031.023	824.031.023
9	Kab. Limapuluh Kota	-	297.280.945	297.280.945
10	Kab. Kepulauan Mentawai	-	202.585.173	202.585.173
11	Kab. Sijunjung	-	1.992.800.742	1.992.800.742
12	Kab. Solok	-	2.013.635.696	2.013.635.696

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
13	Kota Sawahlunto	10.012.924	867.502.808	877.515.732
14	Kab. Bengkalis	162.122.823	1.344.425.198	1.506.548.021
15	Kab. Indragiri Hilir	-	13.408.003.140	13.408.003.140
16	Kab. Kuantan Singingi	-	350.325.198	350.325.198
17	Kab. Rokan Hulu	-	426.890.401	426.890.401
18	Kota Dumai	-	1.344.425.198	1.344.425.198
19	Kab. Batang Hari	-	7.482.492.103	7.482.492.103
20	Kab. Sarolangun	-	3.402.694.968	3.402.694.968
21	Kab. Tebo	-	7.672.075.121	7.672.075.121
22	Kab. Lahat	-	139.699.930.612	139.699.930.612
23	Kab. Musi Rawas	-	13.625.977.544	13.625.977.544
24	Kota Palembang	-	17.247.746.938	17.247.746.938

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
25	Kota Prabumulih	-	15.804.282.569	15.804.282.569
26	Kota Pagar Alam	-	17.879.646.307	17.879.646.307
27	Kab. Banyuasin	682.717.767	19.203.790.959	19.886.508.726
28	Kab. Empat Lawang	292.709.142	13.940.111.011	14.232.820.153
29	Kab. Musi Rawas Utara	-	34.882.520.094	34.882.520.094
30	Provinsi Bengkulu	-	4.740.879.777	4.740.879.777
31	Kab. Bengkulu Selatan	344.091.060	1.246.853.434	1.590.944.494
32	Kab. Bengkulu Utara	-	11.767.858.318	11.767.858.318
33	Kab. Rejang Lebong	51.656	1.266.247.577	1.266.299.233
34	Kab. Kaur	-	1.116.271.161	1.116.271.161
35	Kab. Seluma	49.882.828	1.932.817.478	1.982.700.306
36	Kab. Lebong	31.906.325	1.116.312.251	1.148.218.576

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
37	Provinsi Jawa Barat	-	2.734.233.133	2.734.233.133
38	Provinsi Jawa Tengah	49.661.487	-	49.661.487
39	Kab. Lamongan	12.617.177	-	12.617.177
40	Provinsi Kalimantan Barat	9.208.628.812	52.934.578.430	62.143.207.242
41	Kab. Bengkayang	-	7.379.158.918	7.379.158.918
42	Kab. Kapuas Hulu	-	10.691.976.168	10.691.976.168
43	Kab. Ketapang	34.666.547.317	42.938.840.550	77.605.387.867
44	Kab. Sanggau	-	59.579.744.726	59.579.744.726
45	Kab. Sintang	-	7.978.458.375	7.978.458.375
46	Kota Pontianak	-	7.559.101.779	7.559.101.779
47	Kab. Sekadau	-	8.434.221.843	8.434.221.843
48	Kab. Melawi	-	9.110.929.839	9.110.929.839

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
49	Kab. Kayong Utara	-	7.598.427.519	7.598.427.519
50	Kab. Kubu Raya	8.378.408	9.063.904.193	9.072.282.601
51	Provinsi Kalimantan Tengah	-	172.117.011.266	172.117.011.266
52	Kab. Barito Selatan	-	38.825.961.316	38.825.961.316
53	Kab. Barito Utara	-	120.025.177.858	120.025.177.858
54	Kab. Kapuas	-	76.929.457.925	76.929.457.925
55	Kab. Kotawaringin Barat	-	25.615.099.987	25.615.099.987
56	Kab. Kotawaringin Timur	-	40.822.582.586	40.822.582.586
57	Kota Palangkaraya	-	22.672.951.982	22.672.951.982
58	Kab. Katingan	-	28.896.924.429	28.896.924.429
59	Kab. Seruyan	-	30.881.152.159	30.881.152.159
60	Kab. Sukamara	-	20.932.378.137	20.932.378.137

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
61	Kab. Lamandau	-	31.705.976.200	31.705.976.200
62	Kab. Gunung Mas	-	27.844.053.238	27.844.053.238
63	Kab. Pulang Pisau	-	26.562.290.580	26.562.290.580
64	Kab. Murung Raya	-	126.308.725.599	126.308.725.599
65	Kab. Barito Timur	-	25.797.603.822	25.797.603.822
66	Provinsi Kalimantan Selatan	-	283.586.751.577	283.586.751.577
67	Kab. Banjar	-	52.861.820.689	52.861.820.689
68	Kab. Barito Kuala	-	46.229.807.229	46.229.807.229
69	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	41.533.267.804	41.533.267.804
70	Kab. Hulu Sungai Utara	-	44.915.878.042	44.915.878.042
71	Kab. Kotabaru	-	121.189.583.332	121.189.583.332
72	Kab. Tabalong	-	84.584.538.251	84.584.538.251

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
73	Kab. Tapin	-	100.688.947.991	100.688.947.991
74	Kab. Balangan	-	280.912.035.087	280.912.035.087
75	Kab. Tanah Bumbu	-	179.902.270.630	179.902.270.630
76	Provinsi Kalimantan Timur	-	944.462.416.970	944.462.416.970
77	Kab. Berau	-	347.296.284.338	347.296.284.338
78	Kab. Kutai Kartanegara	5.875.306.357	844.505.320.983	850.380.627.340
79	Kab. Kutai Barat	-	379.488.902.163	379.488.902.163
80	Kab. Kutai Timur	-	633.804.153.247	633.804.153.247
81	Kab. Paser	-	301.230.937.871	301.230.937.871
82	Kota Balikpapan	-	190.008.304.715	190.008.304.715
83	Kota Bontang	-	213.687.948.823	213.687.948.823
84	Kab. Penajam Paser Utara	-	188.710.887.928	188.710.887.928

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
85	Kab. Mahakam Ulu	-	199.161.002.394	199.161.002.394
86	Provinsi Sulawesi Tengah	5.609.130.079	124.278.540.014	129.887.670.093
87	Kab. Banggai	1.464.505.933	30.056.517.162	31.521.023.095
88	Kab. Banggai Kepulauan	-	18.149.169.456	18.149.169.456
89	Kab. Donggala	-	18.119.137.036	18.119.137.036
90	Kab. Morowali	-	135.496.218.091	135.496.218.091
91	Kab. Poso	1.519.048	19.098.900.820	19.100.419.868
92	Kota Palu	-	18.318.598.121	18.318.598.121
93	Kab. Parigi Moutong	-	19.082.832.991	19.082.832.991
94	Kab. Tojo Una Una	-	20.214.732.922	20.214.732.922
95	Kab. Banggai Laut	-	17.929.022.090	17.929.022.090
96	Kab. Morowali Utara	1.007.374.899	56.056.218.187	57.063.593.086

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
97	Kab. Luwu Timur	-	39.164.165.345	39.164.165.345
98	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	168.276.232.041	168.276.232.041
99	Kab. Konawe	-	21.253.344.856	21.253.344.856
100	Kab. Kolaka	-	97.701.730.900	97.701.730.900
101	Kab. Konawe Selatan	-	69.586.739.409	69.586.739.409
102	Kab. Bombana	-	68.350.470.463	68.350.470.463
103	Kab. Kolaka Utara	-	39.813.193.181	39.813.193.181
104	Kab. Konawe Utara	-	146.636.162.578	146.636.162.578
105	Kab. Kolaka Timur	-	21.372.889.212	21.372.889.212
106	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	51.395.726.155	51.395.726.155
107	Kab. Sumbawa	-	9.650.738.191	9.650.738.191
108	Kab. Sumbawa Barat	-	92.539.383.405	92.539.383.405

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
109	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	552.624.828	552.624.828
110	Kab. Maluku Tengah	-	566.887.176	566.887.176
111	Kab. Seram Bagian Timur	-	588.430.939	588.430.939
112	Kab. Kepulauan Aru	-	259.320.202	259.320.202
113	Kab. Maluku Barat Daya	-	5.431.360.194	5.431.360.194
114	Kab. Paniai	-	15.438.528.662	15.438.528.662
115	Kab. Asmat	-	15.459.808.738	15.459.808.738
116	Kab. Nduga	-	15.120.348.729	15.120.348.729
117	Kab. Dogiyai	-	15.534.109.527	15.534.109.527
118	Kab. Puncak	-	14.072.816.911	14.072.816.911
119	Kab. Intan Jaya	-	17.935.724.234	17.935.724.234
120	Kab. Deiyai	-	15.634.949.040	15.634.949.040

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
121	Provinsi Maluku Utara	-	101.545.352.820	101.545.352.820
122	Kab. Halmahera Tengah	-	60.455.382.549	60.455.382.549
123	Kab. Halmahera Timur	-	127.901.342.548	127.901.342.548
124	Kab. Halmahera Selatan	-	34.991.051.043	34.991.051.043
125	Kota Tidore Kepulauan	-	17.392.896.039	17.392.896.039
126	Kab. Bangka Selatan	-	40.829.306.599	40.829.306.599
127	Kab. Fak Fak	-	3.971.254.838	3.971.254.838
128	Kab. Raja Ampat	-	35.448.099.071	35.448.099.071
129	Provinsi Kalimantan Utara	-	63.757.377.198	63.757.377.198
130	Kab. Bulungan	-	47.929.196.753	47.929.196.753
131	Kab. Malinau	-	77.856.460.093	77.856.460.093
132	Kab. Nunukan	-	28.483.439.677	28.483.439.677

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
133	Kab. Tana Tidung	-	90.109.751.965	90.109.751.965
	JUMLAH	61.202.661.435	9.028.722.553.095	9.089.925.214.530

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Kab. Bengkalis	-	131.079.814	-	131.079.814
2	Kab. Kuantan Singingi	-	775.975.106	-	775.975.106
3	Kota Dumai	-	407.076.691	-	407.076.691
4	Provinsi Jawa Tengah	-	1.317.418.020	122.343.948	1.439.761.968
5	Kab. Lamongan	-	112.700.045	-	112.700.045
6	Kab. Kapuas Hulu	104.684.827	-	-	104.684.827
7	Kab. Fak Fak	11.252.563.143	-	-	11.252.563.143
	JUMLAH	11.357.247.970	2.744.249.676	122.343.948	14.223.841.594

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Kab. Limapuluh Kota	26.074.608	-	-	26.074.608
2	Provinsi Jawa Barat	-	-	22.499.716.745	22.499.716.745
3	Provinsi Jawa Tengah	-	-	2.424.579.349	2.424.579.349
4	Kab. Lamongan	-	16.264.672	-	16.264.672
	JUMLAH	26.074.608	16.264.672	24.924.296.094	24.966.635.374

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPH PASAL 21	PPH PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Kota Medan	-	4.081.222.197	4.081.222.197
2	Provinsi DKI Jakarta	28.722.505.162	294.388.677.976	323.111.183.138
3	Provinsi DI Yogyakarta	-	1.610.617.794	1.610.617.794
4	Kota Makassar	-	2.482.851.160	2.482.851.160
5	Kota Denpasar	-	155.012.757	155.012.757
6	Provinsi Banten	-	8.628.876.091	8.628.876.091
7	Kab. Serang	-	232.212.802	232.212.802
8	Kab. Tangerang	1.097.951.061	3.289.545.091	4.387.496.152
9	Kota Tangerang	1.296.642.029	4.375.884.358	5.672.526.387
10	Kota Tangerang Selatan	-	4.479.888.073	4.479.888.073
	JUMLAH	31.117.098.252	323.724.788.299	354.841.886.551

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH			
			SEKTOR			
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA					
1	2	3	4	5	6	7
1	Kab. Labuhanbatu	-	337.650.784	-	-	-
2	Kota Medan	803.667.166	-	-	-	-
3	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	-	-	-
4	Kota Padang	-	-	-	-	1.148.249.313
5	Provinsi DKI Jakarta	803.757.166	-	-	5.013.650.594	-
6	Provinsi DI Yogyakarta	-	725.272	-	-	15.219.690
7	Kab. Sleman	333.826.046	-	-	-	-
8	Kota Makassar	803.667.166	-	-	-	-
9	Kota Denpasar	803.667.166	-	-	-	-
10	Provinsi Banten	-	416.708.464	436.076.577	-	884.347.258
11	Kab. Lebak	-	55.632.497	-	-	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH		BIAYA PEMUNGUTAN		
		SEKTOR		SEKTOR		
		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	8	9=3+4+5+6+7+8	10	11	12
1	Kab. Labuhanbatu	60.364.157	398.014.941	565.320.701	-	-
2	Kota Medan	57.319.157	57.319.157	-	-	-
3	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	871.883.048	-	-
4	Kota Padang	60.807.157	1.209.056.470	-	-	-
5	Provinsi DKI Jakarta	50.381.196	5.064.031.790	-	-	167.121.553
6	Provinsi DI Yogyakarta	76.008.196	91.953.158	27.267	-	-
7	Kab. Sleman	60.807.157	60.807.157	-	-	-
8	Kota Makassar	60.807.157	60.807.157	-	-	-
9	Kota Denpasar	40.305.157	40.305.157	-	-	-
10	Provinsi Banten	121.613.314	1.858.745.613	18.519.954	16.958.361	-
11	Kab. Lebak	60.807.157	116.439.654	36.738.418	34.315.580	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN				JUMLAH
		SEKTOR				
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	13	14	15	16=10+11+12+13 +14+15	17=9+16
1	Kab. Labuhanbatu	-	-	2.389.523	567.710.224	965.725.165
2	Kota Medan	-	-	2.268.523	2.268.523	863.254.846
3	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	2.406.523	874.289.571	874.289.571
4	Kota Padang	-	119.939.411	1.688.560	121.627.971	1.330.684.441
5	Provinsi DKI Jakarta	-	-	1.679.340	168.800.893	6.036.589.849
6	Provinsi DI Yogyakarta	-	507.723	2.533.340	3.068.330	95.021.488
7	Kab. Sleman	-	-	2.026.072	2.026.072	396.659.275
8	Kota Makassar	-	-	2.280.706	2.280.706	866.755.029
9	Kota Denpasar	-	-	1.399.950	1.399.950	845.372.273
10	Provinsi Banten	-	29.478.009	4.054.144	69.010.468	1.927.756.081
11	Kab. Lebak	3.852	22.458.362	2.026.072	95.542.284	211.981.938

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH			
			SEKTOR			
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA					
1	2	3	4	5	6	7
12	Kab. Serang	803.667.166	141.870.447	97.932.659	-	558.435.016
13	Kab. Tangerang	803.667.166	-	-	-	-
14	Kota Tangerang	803.667.166	-	-	-	-
15	Kota Tangerang Selatan	803.667.166	-	-	-	-
JUMLAH		6.763.253.374	952.587.464	534.009.236	5.013.650.594	2.606.251.277



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH		BIAYA PEMUNGUTAN		
		SEKTOR		SEKTOR		
		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	8	9=3+4+5+6+7+8	10	11	12
12	Kab. Serang	60.807.157	859.045.279	6.305.287	3.808.376	-
13	Kab. Tangerang	60.807.157	60.807.157	-	-	-
14	Kota Tangerang	60.807.157	60.807.157	-	-	-
15	Kota Tangerang Selatan	60.807.157	60.807.157	-	-	-
	JUMLAH	892.448.433	9.998.947.004	1.498.794.675	55.082.317	167.121.553

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN				JUMLAH
		SEKTOR				
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	13	14	15	16=10+11+12+13 +14+15	17=9+16
12	Kab. Serang	-	18.614.667	2.026.072	30.754.402	1.693.466.847
13	Kab. Tangerang	-	-	2.026.072	2.026.072	866.500.395
14	Kota Tangerang	-	-	2.026.072	2.026.072	866.500.395
15	Kota Tangerang Selatan	-	-	2.026.072	2.026.072	866.500.395
	JUMLAH	3.852	190.998.172	32.857.041	1.944.857.610	18.707.057.988

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	CHT
1	2	3
1	Provinsi Aceh	361.367.867
2	Kab. Aceh Barat	16.425.808
3	Kab. Aceh Tengah	26.302.767
4	Kab. Aceh Timur	18.792.199
5	Kab. Pidie	32.740.438
6	Kab. Aceh Barat Daya	16.425.808
7	Kab. Aceh Jaya	16.425.808
8	Kab. Nagan Raya	16.425.808
9	Kab. Labuhanbatu	10.016.256
10	Kota Medan	11.986.891
11	Kab. Padang Lawas Utara	10.016.256
12	Kab. Labuhanbatu Selatan	10.016.256
13	Kab. Limapuluh Kota	56.810.572
14	Kab. Kepulauan Mentawai	4.881.343
15	Kab. Sijunjung	4.881.343
16	Kab. Solok	6.582.124
17	Kota Padang	4.881.343
18	Kota Sawahlunto	6.842.305
19	Kab. Bengkalis	19.155
20	Kab. Indragiri Hilir	19.155
21	Kab. Kampar	19.155
22	Kab. Kuantan Singingi	19.155
23	Kab. Pelalawan	19.155
24	Kab. Rokan Hilir	19.155
25	Kab. Rokan Hulu	19.155
26	Kab. Siak	19.155
27	Kota Dumai	19.155
28	Kota Pekanbaru	281.109
29	Kab. Kepulauan Meranti	19.155
30	Kab. Batang Hari	4.754.448
31	Kab. Muaro Jambi	4.754.448
32	Kab. Sarolangun	4.754.448
33	Kab. Tanjung Jabung Barat	4.754.448
34	Kab. Tebo	4.754.448
35	Kab. Lahat	2.754.852
36	Kab. Musi Banyuasin	1.476.463

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	CHT
1	2	3
37	Kab. Musi Rawas	1.476.463
38	Kota Palembang	1.476.463
39	Kota Prabumulih	1.476.463
40	Kota Pagar Alam	1.476.463
41	Kab. Banyuasin	1.476.463
42	Kab. Empat Lawang	1.476.463
43	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.476.463
44	Kab. Musi Rawas Utara	1.476.463
45	Kab. Lampung Timur	35.464.905
46	Provinsi DKI Jakarta	45.257.504
47	Provinsi Jawa Barat	10.042.235.298
48	Kab. Bekasi	391.352.897
49	Kab. Subang	397.715.043
50	Kota Bandung	414.249.538
51	Provinsi Jawa Tengah	10.784.007.289
52	Kab. Blora	909.384.502
53	Provinsi DI Yogyakarta	304.566.654
54	Kab. Sleman	173.624.506
55	Provinsi Jawa Timur	48.268.169.925
56	Kab. Bojonegoro	4.159.471.846
57	Kab. Jombang	3.105.255.185
58	Kab. Lamongan	3.298.998.974
59	Kab. Madiun	1.738.481.939
60	Kab. Nganjuk	1.860.716.475
61	Kab. Ngawi	2.041.885.843
62	Kab. Tuban	2.093.121.512
63	Kota Surabaya	2.045.738.288
64	Provinsi Kalimantan Barat	2.273.843
65	Kab. Bengkayang	3.001.025
66	Kab. Kapuas Hulu	174.937
67	Kab. Ketapang	174.937
68	Kab. Sanggau	174.937
69	Kab. Sintang	174.937
70	Kota Pontianak	205.926
71	Kab. Sekadau	174.937
72	Kab. Melawi	174.937



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	CHT
1	2	3
73	Kab. Kayong Utara	174.937
74	Kab. Kubu Raya	174.937
75	Provinsi Kalimantan Tengah	309
76	Kab. Barito Selatan	52
77	Kab. Barito Utara	52
78	Kab. Kapuas	52
79	Kab. Kotawaringin Barat	361
80	Kab. Kotawaringin Timur	52
81	Kota Palangkaraya	52
82	Kab. Katingan	52
83	Kab. Seruyan	52
84	Kab. Sukamara	52
85	Kab. Lamandau	52
86	Kab. Gunung Mas	52
87	Kab. Pulang Pisau	52
88	Kab. Murung Raya	52
89	Kab. Barito Timur	52
90	Provinsi Kalimantan Selatan	118.279
91	Kab. Banjar	17.245
92	Kab. Barito Kuala	9.810
93	Kab. Hulu Sungai Tengah	9.810
94	Kab. Hulu Sungai Utara	9.810
95	Kab. Kotabaru	9.810
96	Kab. Tabalong	9.810
97	Kab. Tapin	9.810
98	Kab. Balangan	9.810
99	Kab. Tanah Bumbu	9.810
100	Provinsi Kalimantan Timur	195.932
101	Kab. Berau	21.770
102	Kab. Kutai Kartanegara	21.770
103	Kab. Kutai Barat	21.770
104	Kab. Kutai Timur	21.770
105	Kab. Paser	21.770
106	Kota Balikpapan	33.622
107	Kota Bontang	21.770
108	Kab. Penajam Paser Utara	21.770

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	CHT
1	2	3
109	Kab. Mahakam Ulu	21.770
110	Provinsi Sulawesi Tengah	14.498.336
111	Kab. Banggai	15.432.228
112	Kab. Banggai Kepulauan	1.208.127
113	Kab. Donggala	1.208.127
114	Kab. Morowali	1.208.127
115	Kab. Poso	1.208.127
116	Kota Palu	1.208.127
117	Kab. Parigi Moutong	5.106.543
118	Kab. Tojo Una Una	1.208.127
119	Kab. Banggai Laut	1.208.127
120	Kab. Morowali Utara	1.208.127
121	Kab. Luwu Timur	15.557.497
122	Kota Makassar	23.122.723
123	Provinsi Sulawesi Tenggara	141.561
124	Kab. Konawe	8.851
125	Kab. Kolaka	8.851
126	Kab. Konawe Selatan	8.851
127	Kab. Bombana	8.851
128	Kab. Kolaka Utara	8.851
129	Kab. Konawe Utara	8.851
130	Kab. Kolaka Timur	8.851
131	Kota Denpasar	116.039.440
132	Provinsi Nusa Tenggara Barat	8.162.770.211
133	Kab. Sumbawa	863.054.965
134	Kab. Sumbawa Barat	273.380.496
135	Provinsi Banten	15.054.408
136	Kab. Lebak	2.150.639
137	Kab. Serang	2.150.639
138	Kab. Tangerang	3.185.518
139	Kota Tangerang	3.947.254
140	Kota Tangerang Selatan	17.188.295
141	Kab. Natuna	605.736
142	Kab. Kepulauan Anambas	605.736
143	Kota Batam	4.845.738
144	Provinsi Kalimantan Utara	28.480

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	CHT
1	2	3
145	Kab. Bulungan	7.104
146	Kab. Malinau	7.104
147	Kab. Nunukan	7.104
148	Kab. Tana Tidung	7.104
JUMLAH		102.337.928.419

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,50%	Sub Jumlah
1	2	3	4	5=3+4
1	Provinsi Aceh	-	-	-
2	Kab. Labuhanbatu	22.972.387	766.113	23.738.500
3	Kota Medan	22.972.387	766.113	23.738.500
4	Kab. Labuhanbatu Selatan	22.972.387	766.113	23.738.500
5	Kab. Kampar	-	-	-
6	Kab. Pelalawan	-	-	-
7	Kab. Rokan Hilir	7.418.877.458	1.790.030.422	9.208.907.880
8	Kab. Siak	-	-	-
9	Kota Pekanbaru	-	-	-
10	Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-
11	Kab. Muaro Jambi	-	-	-
12	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	6	7	8	9=6+7+8	10=5+9
1	Provinsi Aceh	-	-	5.426.523.833	5.426.523.833	5.426.523.833
2	Kab. Labuhanbatu	21.537.024	359.284	-	21.896.308	45.634.808
3	Kota Medan	21.537.024	359.284	-	21.896.308	45.634.808
4	Kab. Labuhanbatu Selatan	21.537.024	359.284	-	21.896.308	45.634.808
5	Kab. Kampar	4.728.739.050	241.521.633	-	4.970.260.683	4.970.260.683
6	Kab. Pelalawan	4.946.893.075	784.632.446	-	5.731.525.521	5.731.525.521
7	Kab. Rokan Hilir	5.050.665.087	84.177.718	-	5.134.842.805	14.343.750.685
8	Kab. Siak	2.571.223.554	70.603.958	-	2.641.827.512	2.641.827.512
9	Kota Pekanbaru	92.192.058	84.177.718	-	176.369.776	176.369.776
10	Kab. Kepulauan Meranti	1.733.091.159	81.731.016	-	1.814.822.175	1.814.822.175
11	Kab. Muaro Jambi	1.703.358.027	323.264.983	-	2.026.623.010	2.026.623.010
12	Kab. Tanjung Jabung Barat	18.429.599.415	3.397.269.694	-	21.826.869.109	21.826.869.109

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,50%	Sub Jumlah
1	2	3	4	5=3+4
13	Kab. Musi Banyuasin	-	-	-
14	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-
15	Kab. Lampung Timur	2.239.692.543	656.990.624	2.896.683.167
16	Provinsi DKI Jakarta	28.910.675.387	963.689.213	29.874.364.600
17	Kab. Bekasi	-	-	-
18	Kab. Subang	-	-	-
19	Kota Bandung	508.199.664	65.905.278	574.104.942
20	Kab. Blora	-	-	-
21	Provinsi Jawa Timur	-	1.900.621.257	1.900.621.257
22	Kab. Bojonegoro	203.578.220.117	31.708.942.935	235.287.163.052
23	Kab. Jombang	660.623.954	890.727.700	1.551.351.654
24	Kab. Madiun	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	6	7	8	9=6+7+8	10=5+9
13	Kab. Musi Banyuasin	6.453.046.086	5.654.999.701	-	12.108.045.787	12.108.045.787
14	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5.376.994.220	432.220.413	-	5.809.214.633	5.809.214.633
15	Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	2.896.683.167
16	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-	29.874.364.600
17	Kab. Bekasi	112.338.387	187.209.125	-	299.547.512	299.547.512
18	Kab. Subang	3.527.808.738	464.812.870	-	3.992.621.608	3.992.621.608
19	Kota Bandung	3.491.325.675	57.975.657	-	3.549.301.332	4.123.406.274
20	Kab. Blora	208.110.994	109.601.186	-	317.712.180	317.712.180
21	Provinsi Jawa Timur	24.610.084.665	421.678.036	-	25.031.762.701	26.932.383.958
22	Kab. Bojonegoro	-	-	-	-	235.287.163.052
23	Kab. Jombang	1.281.157.924	21.050.042	-	1.302.207.966	2.853.559.620
24	Kab. Madiun	992.279.489	21.050.042	-	1.013.329.531	1.013.329.531

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,50%	Sub Jumlah
1	2	3	4	5=3+4
25	Kab. Nganjuk	-	-	-
26	Kab. Ngawi	-	-	-
27	Kab. Tuban	1.409.611.044	1.032.018.509	2.441.629.553
28	Kota Surabaya	17.109.566.035	890.727.700	18.000.293.735
29	Kota Makassar	94.149	3.138	97.287
30	Kab. Natuna	-	-	-
31	Kab. Kepulauan Anambas	-	-	-
32	Kota Batam	-	-	-
33	Provinsi Papua Barat	-	-	-
34	Kab. Sorong	-	-	-
35	Kota Sorong	-	-	-
36	Kab. Sorong Selatan	-	-	-

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	6	7	8	9=6+7+8	10=5+9
25	Kab. Nganjuk	1.031.760.135	21.050.042	-	1.052.810.177	1.052.810.177
26	Kab. Ngawi	948.859.512	21.050.042	-	969.909.554	969.909.554
27	Kab. Tuban	1.352.307.038	22.235.861	-	1.374.542.899	3.816.172.452
28	Kota Surabaya	1.281.157.924	21.050.042	-	1.302.207.966	19.302.501.701
29	Kota Makassar	-	-	-	-	97.287
30	Kab. Natuna	19.918.356.066	1.963.461.509	-	21.881.817.575	21.881.817.575
31	Kab. Kepulauan Anambas	14.140.502.943	1.562.520.585	-	15.703.023.528	15.703.023.528
32	Kota Batam	7.777.558.303	1.094.755.839	-	8.872.314.142	8.872.314.142
33	Provinsi Papua Barat	-	-	170.426.809.445	170.426.809.445	170.426.809.445
34	Kab. Sorong	4.245.173.679	-	-	4.245.173.679	4.245.173.679
35	Kota Sorong	2.288.150.246	-	-	2.288.150.246	2.288.150.246
36	Kab. Sorong Selatan	1.367.401.106	-	-	1.367.401.106	1.367.401.106

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		15%	0,50%	Sub Jumlah
1	2	3	4	5=3+4
37	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-
38	Kab. Teluk Wondama	-	-	-
39	Kab. Kaimana	-	-	-
40	Kab. Maybrat	-	-	-
41	Kab. Tambrauw	-	-	-
42	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-
43	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-
	JUMLAH	261.904.477.512	39.901.955.115	301.806.432.627

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	6	7	8	9=6+7+8	10=5+9
37	Kab. Teluk Bintuni	43.753.883.822	-	-	43.753.883.822	43.753.883.822
38	Kab. Teluk Wondama	436.248.219	-	-	436.248.219	436.248.219
39	Kab. Kaimana	648.135.290	-	-	648.135.290	648.135.290
40	Kab. Maybrat	924.081.816	-	-	924.081.816	924.081.816
41	Kab. Tambrauw	1.498.989.208	-	-	1.498.989.208	1.498.989.208
42	Kab. Manokwari Selatan	843.606.845	-	-	843.606.845	843.606.845
43	Kab. Pegunungan Arfak	346.262.769	-	-	346.262.769	346.262.769
JUMLAH		188.175.953.596	17.145.178.010	175.853.333.278	381.174.464.884	682.980.897.511

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Provinsi Aceh	630.241.642	14.205.651.022	14.835.892.664
2	Kab. Aceh Barat	-	2.196.378.764	2.196.378.764
3	Kab. Aceh Tengah	-	514.798.431	514.798.431
4	Kab. Aceh Timur	-	995.022.005	995.022.005
5	Kab. Pidie	-	297.081.863	297.081.863
6	Kab. Aceh Barat Daya	-	538.230.483	538.230.483
7	Kab. Aceh Jaya	-	272.905.787	272.905.787
8	Kab. Nagan Raya	-	1.572.298.753	1.572.298.753
9	Kab. Labuhanbatu	-	1.867.136.727	1.867.136.727
10	Kota Medan	-	1.867.136.727	1.867.136.727
11	Kab. Padang Lawas Utara	-	1.043.105.704	1.043.105.704
12	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	1.867.136.727	1.867.136.727
13	Kab. Kepulauan Mentawai	-	93.200.186	93.200.186
14	Kab. Sijunjung	-	458.221.881	458.221.881

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
15	Kab. Solok	-	310.256.462	310.256.462
16	Kota Padang	47.671.399	295.785.359	343.456.758
17	Kota Sawahlunto	-	495.704.831	495.704.831
18	Kab. Indragiri Hilir	-	304.958.931	304.958.931
19	Kab. Kampar	-	1.344.425.198	1.344.425.198
20	Kab. Pelalawan	-	1.344.425.198	1.344.425.198
21	Kab. Rokan Hilir	64.000	1.344.425.198	1.344.489.198
22	Kab. Rokan Hulu	-	917.534.797	917.534.797
23	Kab. Siak	-	1.344.425.198	1.344.425.198
24	Kota Pekanbaru	-	1.344.425.198	1.344.425.198
25	Kab. Batang Hari	-	4.471.156.765	4.471.156.765
26	Kab. Muaro Jambi	295.506.319	3.738.671.031	4.034.177.350
27	Kab. Sarolangun	-	5.430.227.975	5.430.227.975
28	Kab. Tanjung Jabung Barat	774.072	3.777.574.886	3.778.348.958

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
29	Kab. Tebo	-	5.131.360.186	5.131.360.186
30	Kab. Lahat	-	41.233.403.176	41.233.403.176
31	Kab. Musi Banyuasin	1.362.728.392	33.683.912.767	35.046.641.159
32	Kab. Musi Rawas	-	9.006.294.657	9.006.294.657
33	Kota Palembang	-	5.384.525.263	5.384.525.263
34	Kota Prabumulih	-	6.827.989.632	6.827.989.632
35	Kota Pagar Alam	-	4.752.625.894	4.752.625.894
36	Kab. Banyuasin	-	5.016.069.646	5.016.069.646
37	Kab. Empat Lawang	-	8.692.161.190	8.692.161.190
38	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	106.252.760	22.632.272.201	22.738.524.961
39	Kab. Musi Rawas Utara	-	13.760.998.046	13.760.998.046
40	Provinsi Bengkulu	-	2.055.954.055	2.055.954.055
41	Kab. Bengkulu Selatan	-	263.554.307	263.554.307
42	Kab. Bengkulu Utara	-	3.515.074.563	3.515.074.563

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
43	Kab. Rejang Lebong	-	244.160.164	244.160.164
44	Kab. Kaur	-	314.136.580	314.136.580
45	Kab. Seluma	-	988.423.334	988.423.334
46	Kab. Lebong	-	534.260.917	534.260.917
47	Kab. Lampung Timur	13.588.322	-	13.588.322
48	Kab. Bekasi	8.057.565	210.325.779	218.383.344
49	Kab. Subang	-	210.325.779	210.325.779
50	Kota Bandung	-	210.325.779	210.325.779
51	Kab. Sleman	102.312	-	102.312
52	Kab. Bojonegoro	8.975.848	-	8.975.848
53	Kab. Jombang	1.205.193	-	1.205.193
54	Kab. Madiun	1.884.728	-	1.884.728
55	Kab. Nganjuk	4.248.336	-	4.248.336
56	Kab. Ngawi	5.218.774	-	5.218.774

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
57	Kab. Tuban	63.007.892	-	63.007.892
58	Provinsi Kalimantan Barat	-	18.758.096.837	18.758.096.837
59	Kab. Bengkayang	-	3.650.483.662	3.650.483.662
60	Kab. Ketapang	-	19.223.068.221	19.223.068.221
61	Kab. Sanggau	-	13.340.520.739	13.340.520.739
62	Kab. Sintang	-	3.051.184.205	3.051.184.205
63	Kota Pontianak	-	3.470.540.801	3.470.540.801
64	Kab. Sekadau	-	2.595.420.737	2.595.420.737
65	Kab. Melawi	-	1.536.070.259	1.536.070.259
66	Kab. Kayong Utara	-	2.810.202.364	2.810.202.364
67	Kab. Kubu Raya	-	1.965.738.387	1.965.738.387
68	Provinsi Kalimantan Tengah	-	14.740.215.230	14.740.215.230
69	Kab. Barito Selatan	-	11.597.365.016	11.597.365.016
70	Kab. Barito Utara	-	23.816.134.014	23.816.134.014

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
71	Kab. Kapuas	-	22.882.352.938	22.882.352.938
72	Kab. Kotawaringin Barat	-	7.651.263.272	7.651.263.272
73	Kab. Kotawaringin Timur	-	4.878.608.403	4.878.608.403
74	Kota Palangkaraya	-	8.385.886.297	8.385.886.297
75	Kab. Katingan	-	4.945.954.864	4.945.954.864
76	Kab. Seruyan	-	9.224.240.203	9.224.240.203
77	Kab. Sukamara	-	6.252.528.482	6.252.528.482
78	Kab. Lamandau	-	5.346.123.175	5.346.123.175
79	Kab. Gunung Mas	-	5.860.377.078	5.860.377.078
80	Kab. Pulang Pisau	-	4.478.817.371	4.478.817.371
81	Kab. Murung Raya	-	20.386.244.619	20.386.244.619
82	Kab. Barito Timur	-	9.541.579.444	9.541.579.444
83	Provinsi Kalimantan Selatan	-	43.976.963.218	43.976.963.218
84	Kab. Banjar	-	19.478.257.245	19.478.257.245



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
85	Kab. Barito Kuala	-	13.751.729.349	13.751.729.349
86	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	12.333.160.924	12.333.160.924
87	Kab. Hulu Sungai Utara	-	16.539.841.907	16.539.841.907
88	Kab. Kotabaru	-	28.232.797.766	28.232.797.766
89	Kab. Tabalong	-	25.209.055.971	25.209.055.971
90	Kab. Tapin	-	37.160.322.440	37.160.322.440
91	Kab. Balangan	-	47.293.135.653	47.293.135.653
92	Kab. Tanah Bumbu	-	29.857.269.666	29.857.269.666
93	Provinsi Kalimantan Timur	-	221.540.371.011	221.540.371.011
94	Kab. Berau	-	47.891.791.854	47.891.791.854
95	Kab. Kutai Kartanegara	-	248.274.575.868	248.274.575.868
96	Kab. Kutai Barat	-	113.353.806.149	113.353.806.149
97	Kab. Kutai Timur	-	189.318.101.927	189.318.101.927
98	Kab. Paser	-	111.414.160.730	111.414.160.730

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
99	Kota Balikpapan	-	56.755.693.761	56.755.693.761
100	Kota Bontang	-	50.124.311.904	50.124.311.904
101	Kab. Penajam Paser Utara	-	31.819.583.931	31.819.583.931
102	Kab. Mahakam Ulu	-	43.425.915.569	43.425.915.569
103	Provinsi Sulawesi Tengah	-	17.468.663.089	17.468.663.089
104	Kab. Banggai	-	43.580.575.295	43.580.575.295
105	Kab. Banggai Kepulauan	-	5.376.020.557	5.376.020.557
106	Kab. Donggala	-	5.505.396.648	5.505.396.648
107	Kab. Morowali	-	39.559.501.626	39.559.501.626
108	Kab. Poso	-	4.525.632.864	4.525.632.864
109	Kota Palu	-	5.305.935.563	5.305.935.563
110	Kab. Parigi Moutong	-	4.541.700.693	4.541.700.693
111	Kab. Tojo Una Una	-	3.409.800.762	3.409.800.762
112	Kab. Banggai Laut	-	5.695.511.594	5.695.511.594

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
113	Kab. Morowali Utara	-	13.268.974.382	13.268.974.382
114	Kab. Luwu Timur	-	6.056.905.380	6.056.905.380
115	Kota Makassar	-	2.092.303.070	2.092.303.070
116	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	47.755.021.352	47.755.021.352
117	Kab. Konawe	-	7.759.169.856	7.759.169.856
118	Kab. Kolaka	-	16.474.030.288	16.474.030.288
119	Kab. Konawe Selatan	-	25.723.774.528	25.723.774.528
120	Kab. Bombana	-	16.013.491.814	16.013.491.814
121	Kab. Kolaka Utara	-	6.699.310.309	6.699.310.309
122	Kab. Konawe Utara	-	54.004.135.144	54.004.135.144
123	Kab. Kolaka Timur	-	6.187.549.501	6.187.549.501
124	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	5.947.796.485	5.947.796.485
125	Kab. Sumbawa	-	2.588.552.005	2.588.552.005
126	Kab. Sumbawa Barat	-	33.775.815.632	33.775.815.632

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
127	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	366.984.600	366.984.600
128	Kab. Maluku Tengah	-	352.722.252	352.722.252
129	Kab. Seram Bagian Timur	-	331.178.489	331.178.489
130	Kab. Kepulauan Aru	-	660.289.226	660.289.226
131	Kab. Maluku Barat Daya	-	2.008.859.250	2.008.859.250
132	Kab. Paniai	-	4.591.065.934	4.591.065.934
133	Kab. Asmat	-	2.606.765.427	2.606.765.427
134	Kab. Nduga	-	5.572.015.121	5.572.015.121
135	Kab. Dogiyai	-	3.623.360.841	3.623.360.841
136	Kab. Puncak	-	4.183.126.060	4.183.126.060
137	Kab. Intan Jaya	-	3.003.800.856	3.003.800.856
138	Kab. Deiyai	-	4.649.736.956	4.649.736.956
139	Provinsi Maluku Utara	-	13.485.494.790	13.485.494.790
140	Kab. Halmahera Tengah	-	24.412.199.209	24.412.199.209

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
141	Kab. Halmahera Timur	-	47.305.976.011	47.305.976.011
142	Kab. Halmahera Selatan	-	8.207.777.405	8.207.777.405
143	Kota Tidore Kepulauan	-	5.195.280.635	5.195.280.635
144	Provinsi Banten	138.198.327	2.361.740.066	2.499.938.393
145	Kab. Lebak	308.501.428	676.099.178	984.600.606
146	Kab. Serang	-	674.782.590	674.782.590
147	Kab. Tangerang	512.000	674.782.590	675.294.590
148	Kota Tangerang	-	674.782.590	674.782.590
149	Kota Tangerang Selatan	-	674.782.590	674.782.590
150	Kab. Bangka Selatan	-	15.101.250.386	15.101.250.386
151	Kab. Natuna	-	1.155.696.136	1.155.696.136
152	Kab. Kepulauan Anambas	-	1.155.696.136	1.155.696.136
153	Kota Batam	234.595.677	1.155.696.136	1.390.291.813
154	Provinsi Papua Barat	-	23.827.528.028	23.827.528.028

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
155	Kab. Sorong	-	3.496.054.838	3.496.054.838
156	Kota Sorong	3.443.200	3.971.254.838	3.974.698.038
157	Kab. Raja Ampat	-	12.682.156.985	12.682.156.985
158	Kab. Sorong Selatan	-	3.971.254.838	3.971.254.838
159	Kab. Teluk Bintuni	-	3.971.254.838	3.971.254.838
160	Kab. Teluk Wondama	-	3.971.254.838	3.971.254.838
161	Kab. Kaimana	-	3.971.254.838	3.971.254.838
162	Kab. Maybrat	-	3.971.254.838	3.971.254.838
163	Kab. Tambrau	-	3.971.254.838	3.971.254.838
164	Kab. Manokwari Selatan	-	3.971.254.838	3.971.254.838
165	Kab. Pegunungan Arfak	-	3.971.254.838	3.971.254.838
166	Provinsi Kalimantan Utara	-	19.044.382.891	19.044.382.891
167	Kab. Bulungan	-	8.081.604.715	8.081.604.715
168	Kab. Malinau	-	16.154.843.338	16.154.843.338

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
169	Kab. Nunukan	-	6.681.293.561	6.681.293.561
170	Kab. Tana Tidung	-	15.193.905.705	15.193.905.705
	JUMLAH	3.234.778.186	2.512.140.892.963	2.515.375.671.149

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Provinsi Aceh	-	53.160.855	370.093.665	423.254.520
2	Kab. Aceh Barat	-	2.845.383	-	2.845.383
3	Kab. Aceh Tengah	-	39.566.266	-	39.566.266
4	Kab. Aceh Timur	-	33.422.607	-	33.422.607
5	Kab. Pidie	-	4.410.554	-	4.410.554
6	Kab. Aceh Barat Daya	-	4.832.896	-	4.832.896
7	Kab. Aceh Jaya	-	3.289.782	-	3.289.782
8	Kab. Nagan Raya	-	4.911.173	-	4.911.173
9	Kab. Labuhanbatu	-	33.695.418	-	33.695.418
10	Kota Medan	-	38.881.805	-	38.881.805
11	Kab. Padang Lawas Utara	-	555.090.435	-	555.090.435
12	Kab. Bengkalis	-	5.051.181.340	-	5.051.181.340



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
13	Kab. Indragiri Hilir	-	6.057.388.766	-	6.057.388.766
14	Kab. Kampar	-	3.666.710.482	-	3.666.710.482
15	Kab. Kuantan Singingi	-	4.124.210.875	-	4.124.210.875
16	Kab. Pelalawan	-	6.656.445.302	-	6.656.445.302
17	Kab. Rokan Hilir	-	3.319.131.191	-	3.319.131.191
18	Kab. Rokan Hulu	-	2.206.964.306	-	2.206.964.306
19	Kab. Siak	-	6.465.291.554	-	6.465.291.554
20	Kota Dumai	-	2.152.042.410	-	2.152.042.410
21	Kota Pekanbaru	-	2.272.527.947	-	2.272.527.947
22	Kab. Kepulauan Meranti	-	3.894.783.547	-	3.894.783.547
23	Kab. Batang Hari	-	2.158.633.517	-	2.158.633.517
24	Kab. Muaro Jambi	-	301.814.811	-	301.814.811



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
25	Kab. Sarolangun	-	621.278.563	-	621.278.563
26	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	3.015.432.449	-	3.015.432.449
27	Kab. Tebo	1.873.664	1.107.914.898	-	1.109.788.562
28	Kab. Lahat	-	492.392.674	-	492.392.674
29	Kab. Musi Banyuasin	61.814.400	3.991.723.207	-	4.053.537.607
30	Kab. Musi Rawas	-	2.166.734.361	-	2.166.734.361
31	Kota Palembang	2.013.135	621.115.991	-	623.129.126
32	Kota Prabumulih	-	621.115.991	-	621.115.991
33	Kota Pagar Alam	-	625.795.721	-	625.795.721
34	Kab. Banyuasin	-	1.421.867.667	-	1.421.867.667
35	Kab. Empat Lawang	-	621.115.991	-	621.115.991
36	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	72.653.039	-	72.653.039

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
37	Kab. Musi Rawas Utara	-	893.073.367	-	893.073.367
38	Provinsi Bengkulu	-	16.723.487	177.862.986	194.586.473
39	Kab. Bengkulu Selatan	-	5.026.146	-	5.026.146
40	Kab. Rejang Lebong	-	4.541.095	-	4.541.095
41	Kab. Kaur	-	4.416.874	-	4.416.874
42	Kab. Seluma	-	3.716.775	-	3.716.775
43	Kab. Lebong	-	5.867.175	-	5.867.175
44	Provinsi Jawa Barat	-	349.774.375	-	349.774.375
45	Kab. Bekasi	-	26.905.337	-	26.905.337
46	Kab. Subang	-	30.151.248	-	30.151.248
47	Kota Bandung	-	26.905.337	-	26.905.337
48	Kab. Blora	-	693.619.607	-	693.619.607

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
49	Provinsi DI Yogyakarta	-	33.382.123	-	33.382.123
50	Kab. Sleman	-	16.691.062	-	16.691.062
51	Provinsi Jawa Timur	-	1.694.656.732	94.373.722	1.789.030.454
52	Kab. Bojonegoro	-	494.931.613	-	494.931.613
53	Kab. Jombang	-	82.249.155	-	82.249.155
54	Kab. Madiun	-	543.507.258	-	543.507.258
55	Kab. Nganjuk	-	284.027.990	-	284.027.990
56	Kab. Ngawi	-	1.113.407.130	-	1.113.407.130
57	Kab. Tuban	-	420.520.254	-	420.520.254
58	Kota Surabaya	-	102.287.979	-	102.287.979
59	Kab. Kapuas Hulu	2.532.375.173	-	-	2.532.375.173
60	Kab. Sanggau	634.800.000	-	-	634.800.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
61	Kota Pontianak	40.353.888	-	-	40.353.888
62	Provinsi Kalimantan Tengah	4.044.876.000	-	21.588.034.561	25.632.910.561
63	Kab. Barito Utara	4.337.920.000	-	-	4.337.920.000
64	Kab. Kapuas	96.576.000	-	-	96.576.000
65	Kab. Kotawaringin Timur	-	2.023.482.757	-	2.023.482.757
66	Kab. Katingan	1.832.336.000	-	-	1.832.336.000
67	Kab. Gunung Mas	670.944.000	-	-	670.944.000
68	Kab. Murung Raya	9.241.728.000	-	-	9.241.728.000
69	Provinsi Kalimantan Selatan	-	437.222.795	3.402.855.155	3.840.077.950
70	Kab. Banjar	-	73.357.819	-	73.357.819
71	Kab. Barito Kuala	-	57.164.299	-	57.164.299
72	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	72.870.299	-	72.870.299

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
73	Kab. Hulu Sungai Utara	-	72.870.299	-	72.870.299
74	Kab. Kotabaru	-	194.378.638	-	194.378.638
75	Kab. Tabalong	-	56.445.645	-	56.445.645
76	Kab. Tapin	-	80.785.500	-	80.785.500
77	Kab. Balangan	-	73.014.971	-	73.014.971
78	Kab. Tanah Bumbu	-	477.055.649	-	477.055.649
79	Kab. Berau	-	10.667.768.977	-	10.667.768.977
80	Kab. Kutai Kartanegara	-	5.762.267.276	-	5.762.267.276
81	Kab. Mahakam Ulu	3.290.841.000	-	-	3.290.841.000
82	Provinsi Sulawesi Tengah	-	263.711.820	5.816.661.237	6.080.373.057
83	Kab. Banggai Kepulauan	-	43.951.803	-	43.951.803
84	Kab. Morowali	-	912.186.560	-	912.186.560

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
85	Kota Palu	-	49.621.017	-	49.621.017
86	Kab. Banggai Laut	-	43.951.803	-	43.951.803
87	Kab. Morowali Utara	-	115.104.758	-	115.104.758
88	Kab. Luwu Timur	-	531.227.629	-	531.227.629
89	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	216.750.684	2.292.415.454	2.509.166.138
90	Kab. Konawe	-	101.647.473	-	101.647.473
91	Kab. Konawe Selatan	-	13.777.772	-	13.777.772
92	Kab. Bombana	-	19.325.740	-	19.325.740
93	Kab. Kolaka Utara	-	13.807.585	-	13.807.585
94	Kab. Konawe Utara	-	231.149.013	-	231.149.013
95	Kab. Kolaka Timur	-	196.551.412	-	196.551.412
96	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	136.576.641	1.104.826.813	1.241.403.454

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
97	Kab. Sumbawa	-	117.844.142	-	117.844.142
98	Kab. Sumbawa Barat	-	177.699.104	-	177.699.104
99	Kab. Maluku Tengah	-	381.223.793	-	381.223.793
100	Kab. Paniai	-	20.442.628	-	20.442.628
101	Kab. Nduga	-	20.442.628	-	20.442.628
102	Kab. Dogiyai	-	20.442.628	-	20.442.628
103	Kab. Puncak	-	20.442.628	-	20.442.628
104	Kab. Intan Jaya	-	20.442.628	-	20.442.628
105	Kab. Deiyai	-	20.442.628	-	20.442.628
106	Provinsi Maluku Utara	-	-	3.636.639.089	3.636.639.089
107	Kab. Lebak	-	12.141.014	-	12.141.014
108	Provinsi Papua Barat	3.106.177.000	4.096.403.123	35.523.042.011	42.725.622.134

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
109	Kab. Fak Fak	5.974.598.857	2.992.775.892	-	8.967.374.749
110	Kab. Sorong	-	146.270.559	-	146.270.559
111	Kota Sorong	-	463.247.190	-	463.247.190
112	Kab. Raja Ampat	-	655.260.321	-	655.260.321
113	Kab. Sorong Selatan	-	110.217.595	-	110.217.595
114	Kab. Teluk Bintuni	-	12.647.965.459	-	12.647.965.459
115	Kab. Kaimana	-	3.069.945.735	-	3.069.945.735
116	Kab. Maybrat	-	478.387.725	-	478.387.725
117	Kab. Tambrauw	-	298.007.270	-	298.007.270
118	Kab. Manokwari Selatan	-	171.398.349	-	171.398.349

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
119	Kab. Pegunungan Arfak	-	682.733.520	-	682.733.520
120	Kab. Malinau	2.107.776.000	-	-	2.107.776.000
	JUMLAH	37.977.003.117	120.888.959.086	74.006.804.693	232.872.766.896



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Provinsi Aceh	-	68.757.308	-	68.757.308
2	Kab. Aceh Barat	-	6.250.119	-	6.250.119
3	Kab. Aceh Tengah	-	6.250.119	-	6.250.119
4	Kab. Aceh Timur	-	6.250.119	-	6.250.119
5	Kab. Pidie	-	6.250.119	-	6.250.119
6	Kab. Aceh Barat Daya	-	6.250.119	-	6.250.119
7	Kab. Aceh Jaya	-	6.250.119	-	6.250.119
8	Kab. Nagan Raya	-	6.250.119	-	6.250.119
9	Kab. Labuhanbatu	-	9.660.342	-	9.660.342
10	Kota Medan	-	9.660.342	-	9.660.342
11	Kab. Padang Lawas Utara	-	9.660.342	-	9.660.342
12	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	9.660.342	-	9.660.342

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
13	Kab. Limapuluh Kota	176.664.584	22.522.560	-	199.187.144
14	Kab. Kepulauan Mentawai	202.739.192	22.522.560	-	225.261.752
15	Kab. Sijunjung	202.739.192	22.522.560	-	225.261.752
16	Kab. Solok	202.739.192	145.554.741	-	348.293.933
17	Kota Padang	202.739.192	22.522.560	-	225.261.752
18	Kota Sawahlunto	202.739.192	22.522.560	-	225.261.752
19	Kab. Lampung Timur	-	17.091.094	1.550.977.492	1.568.068.586
20	Provinsi Jawa Barat	-	-	42.489.733.725	42.489.733.725
21	Kab. Bekasi	-	-	4.999.188.652	4.999.188.652
22	Kab. Subang	-	-	4.999.188.652	4.999.188.652
23	Kota Bandung	-	-	4.999.188.652	4.999.188.652
24	Kab. Blora	-	-	142.622.609	142.622.609

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
25	Provinsi Jawa Timur	-	300.899.428	-	300.899.428
26	Kab. Bojonegoro	-	16.264.672	-	16.264.672
27	Kab. Jombang	-	16.264.672	-	16.264.672
28	Kab. Madiun	-	111.910.197	-	111.910.197
29	Kab. Nganjuk	-	16.264.672	-	16.264.672
30	Kab. Ngawi	-	45.256.550	-	45.256.550
31	Kab. Tuban	-	16.264.672	-	16.264.672
32	Kota Surabaya	-	16.264.672	-	16.264.672
33	Provinsi Banten	-	15.988.936	-	15.988.936
34	Kab. Lebak	-	4.568.696	-	4.568.696
35	Kab. Serang	-	406.962.872	-	406.962.872
36	Kab. Tangerang	-	4.568.696	-	4.568.696

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN SISA KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
37	Kota Tangerang	-	4.568.696	-	4.568.696
38	Kota Tangerang Selatan	-	4.568.696	-	4.568.696
JUMLAH		1.190.360.544	1.407.024.271	59.180.899.782	61.778.284.597

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi, dan
Kerja Sama Antar Lembaga,



a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

LUKY ALFIRMAN